

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Belakangan ini, pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor meningkat semakin pesat. Baik di sektor pemerintahan maupun swasta semakin berlomba- lomba untuk meningkatkan tingkat produktivitas dan kualitas pelayanan bagi konsumen atau masyarakat umum. Disamping itu, ada juga jenis perusahaan yang memang dalam kegiatan usahanya lebih memprioritaskan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Jenis organisasi tersebut dikenal dengan organisasi nirlaba (*non profit*) seperti yayasan (rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi) dan badan atau instansi pemerintah.

Dinas sebagai ujung tombak dari semua pelayanan publik yang diberikan dari pemerintah, menjalankan fungsinya tentu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangannya dalam bentuk Laporan Keuangan, yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Pelaporan Keuangan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Laporan Keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi, yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengguna Anggaran dan kuasa Pengguna Anggaran serta pengelola Bendahara Umum Daerah.

Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim dan Kusufi:307, 2014).

Dengan diberlakukannya SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) oleh pemerintah pusat terhadap setiap Kota/Kabupaten terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada pemerintah daerah, diharapkan pemerintah daerah bisa menerapkan atau memberlakukan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai acuan dalam pengelolaan anggaran maupun kekayaan daerah. Dalam SAP dinyatakan bahwa setiap barang/ aset daerah harus ditampilkan dalam Neraca daerah agar dapat diketahui seberapa besar kekayaan daerah tersebut. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PP Nomor 06 tahun 2006 yang telah direvisi menjadi PP No. 27 tahun 2014 yang merupakan turunan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Pengelolaan aset Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) yang professional dan *modern* dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/*stake-holder*.

Agar dapat dibedakan mana yang menjadi aset daerah dan mana yang bukan aset daerah, maka setiap aset daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak harus dikodefikasi. Yang dimaksud dengan kodefikasi adalah pemberian kode/nomor pada setiap barang inventaris yang menjadi milik/dikuasai oleh pemerintah daerah yang menyatakan lokasi dan bidang barang.

Dinas Sosial Provinsi NTT merupakan SKPD yang berpedoman pada PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta memiliki ruang lingkup kerja terkait perlakuan keuangan dan aset daerah yang pelaksanaan keuangannya berpedoman pada peraturan Daerah Provinsi NTT No.9 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk organisasi nirlaba di bawah naungan pemerintah tentu mengacu pada peraturan pemerintah dalam hal ini pengelolaan aset tetapnya. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) wajib melaksanakan tugas pokok dalam penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui usaha bersama pemerintah dan masyarakat. Dalam melancarkan kegiatan operasionalnya, dinas Sosial Provinsi NTT memerlukan aset tetap dalam melaksanakan setiap kegiatannya khususnya aset tetap kendaraan bermotor.

Pengelolaan ataupun penataan barang dan aset daerah yang baik dan teratur sangat membantu dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan

benar, sehingga pada akhir periode dapat dipertanggungjawabkan secara baik pula. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu adanya penghapusan dan pemusnahan Barang Daerah, baik yang bergerak maupun barang tidak bergerak yang tidak memberikan keuntungan bagi pemerintah. Kegiatan ini dimulai dari menginventarisir semua barang daerah yang bergerak dan yang tidak bergerak. Hasil inventaris menunjukkan ada beberapa barang daerah khususnya barang bergerak yaitu kendaraan roda empat dan roda dua tidak layak beroperasi sebagai kendaraan operasional dinas. Dari kendaraan ini ada yang rusak karena telah melewati umur ekonomis, namun ada yang rusak sebelum mencapai umur ekonomis.

Pemerintah telah mengupayakan perbaikan bagi kendaraan-kendaraan yang rusak namun kendaraan ini selalu mengalami kemacetan. Kondisi seperti ini sangat mengganggu kelancaran aktivitas perkantoran terutama aktivitas perkantoran dan pelayanan terhadap masyarakat menjadi terhambat. Dilihat dari keadaan ini, maka dipandang perlu adanya penghapusan bagi kendaraan operasional tersebut.

Dalam melakukan penghapusan aktiva tetap daerah khususnya kendaraan bermotor roda dua dan roda empat diperlukan suatu metode akuntansi. Tujuannya adalah untuk menerbitkan serta mengamankan barang daerah agar tidak terjadi penipuan atau kesalahan dalam proses penghapusannya, terutama untuk mengetahui sejauh mana nilai dari

kendaraan tersebut apabila kendaraan tersebut dijual atau dilelangkan kepada pihak lain.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan operasional ini harus dihapus antara lain :

- 1) Dilihat dari kondisi fisik, kendaraan-kendaraan ini sudah tidak layak dipakai, walaupun dalam kesehariannya kendaraan tetap beroperasi sebagaimana biasanya
- 2) Dilihat dari umur ekonomis, kendaraan-kendaraan ini sudah melampaui umur ekonomis, kendaraan yang mana apabila dipaksakan akan mengurangi nilai manfaat kendaraan sehingga kendaraan ini tidak efisien lagi sebagai kendaraan operasional
- 3) Dilihat dari manfaat maupun kegunaan kendaraan-kendaraan ini tidak memberikan nilai manfaat yang berarti dalam penggunaannya malah merugikan dinas dalam pembiayaan operasionalnya.

Berikut ini data inventaris kendaraan bermotor pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Tabel 1.1**Data Inventaris Kendaraan Bermotor
Pada Dinas Sosial Prov.NTT TA 2016**

No	Nama/jenis barang	Merk/Tipe	Tahun perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku
1.	Minibus DH 748 AW	Suzuki APV	2012	166.659.500	71.425.500,00
2.	Minibus DH 750 AW	Suzuki APV	2012	166.659.500	71.425.500,00
3.	Minibus DH 751 AW	Suzuki APV	2012	166.659.500	71.425.500,00
4.	Minibus DH 749 AW	Suzuki APV	2012	166.659.500	71.425.500,00
5.	Ambulance	Toyota Hilux Pic	2012	221.000.000	94.714.285,71
6.	Toyota DH 23 AW	Innova	2008	194.500.000	-
7.	Isuzu B 8089 FQ	TBR 54F	2007	111.500.000	-
8.	Toyota DH 437/150 FA	Kijang	1999	45.000.000	-
9.	Mitsubishi DH 976 EA	Mini Bus	2003	135.191.065	-
10.	Mitsubishi DH 224/145 GW	Colt L300	1999	35.000.000	-
11.	Tangki Air B 9570 OQ	FE334	2006	279.546.000	-
12.	Toyota DH 173 HA	Kijang	1998	45.000.000	-
13.	Pic Up DH 152	L300	1999	45.000.000	-
14.	Tangki Air B 964 OQ	100 PS	2006	211.900.000	-
15.	Pic Up DH 154	L300	1999	45.000.000	-
16.	Pic UP DH 8013 AW	L300	2003	45.000.000	-
17.	Tangki Air B 9637 OQ	100 PS	2006	241.900.000	-
18.	Isuzu B 9186 OQ	Penyuling Air	2009	373.800.000	-
19.	Toyota Dina B 7149 IQ	Bus UPSK	2006	345.700.000	-
20.	Mitsubishi B 9756 OQ	Rescue	2006	324.750.000	-

21.	Mitsubishi B 9782 OQ	Rescue	2006	232.089.871	-
22.	Mitsubishi B 9644 OQ	Tangki Air	2006	241.900.000	-
23.	Toyota B 9909 LQ	Truck	2009	232.900.000	-
24.	Mitsubishi B 9596 OQ	Tangki Air	2006	249.900.000	-
25.	Honda DH 495 TA	GL 160 D	2006	20.950.000	-
26.	Honda DH 496 TA	NF125 F	2006	13.610.129	-
27.	Honda B 6739 PEQ	GL 160 D	2006	18.500.000	-

Sumber: Data barang inventaris pada kantor Dinas sosial Provinsi NTT tahun 2016

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir semua aset kendaraan bermotor telah melewati masa manfaat dari kendaraan tersebut. Kendaraan-kendaraan bermotor tersebut keadaanya masih baik tetapi kalau dilihat dari keadaan fisik dan masa manfaat kendaraan tersebut kendaraan yang keadaanya masih baik ini perlu dilakukan penghapusan karena masa manfaatnya sudah sangat melampaui batasnya. Kendaraan-kendaraan ini membutuhkan biaya yang lebih untuk biaya pemeliharaan dan perbaikan, tetapi jelas kendaraan tersebut tidak memberikan manfaat ekonomis bagi dinas karena mengingat kendaraan-kendaraan tersebut ada yang usianya sudah belasan tahun, dan kendaraan tersebut selalu mengalami kerusakan yang berturut-turut pada saat kendaraan tersebut sedang beroperasi. Berdasarkan PSAP No.07 dalam PP 71 Tahun 2010 jika dilihat dari masa manfaat kendaraan tersebut, sudah saatnya kendaraan dihentikan pengakuannya dari daftar inventaris dan kendaraan tersebut harus dipindahkan ke pos aset lainnya atau aset tersebut dilelang atau dihapuskan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana tindakan atau pelaksanaan Kantor Dinas Sosial Provinsi NTT terhadap aset yang masa manfaatnya telah habis. Namun penulis membatasi penulisan ini hanya pada barang bergerak yaitu kendaraan bermotor roda empat dan roda dua pada kantor Dinas Sosial Provinsi NTT.

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Kendaraan Bermotor dan Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan Pada Dinas Sosial Provinsi NTT “**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana perlakuan akuntansi aktiva tetap kendaraan bermotor yang masa manfaatnya telah habis pada Dinas Sosial Prov.NTT.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi aktiva tetap kendaraan bermotor yang masa manfaatnya telah habis pada Dinas Sosial Prov.NTT.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya dan memperluas wawasan akuntansi, khususnya dalam hal pengelolaan serta penghapusan aset tetap. Sehingga diharapkan dapat menambah literatur mengenai pengelolaan aset tetap dalam lingkup pemerintah dan akademis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Menambah pengetahuan penulis mengenai penerapan akuntansi aktiva tetap kendaraan bermotor pada Dinas Sosial Provinsi NTT.

b. Bagi akademis

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, referensi kepustakaan dan pemahaman tentang perlakuan akuntansi aktiva tetap khususnya kendaraan bermotor.

2) sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama terkait dengan masalah mengenai aktiva tetap kendaraan bermotor.